



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

MATRIKS KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2026



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MAHKAMAH AGUNG

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 123.760,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.03.02 - Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	persen	54,00	40,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.545.883,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.04 - Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara	persen	0	63,00
PP 07.04 - Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan	persen	0	65,00
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.04.01 - Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai	persen	0	63,00
KP 07.04.02 - Tingkat Kecukupan Personil Jaksa	persen	98,02	98,50
KP 07.04.02 - Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa	persen	10,65	70,00
KP 07.04.02 - Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa	persen	77,60	82,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.036.063,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.17 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,52	97
PP 07.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	0	275
PP 07.09 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		53,95	72,00
PP 07.09 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		87,90	89,00
PP 07.09 - Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio)	persen PDRB	1,13 (Data Realisasi APBD 2024 <i>unaudited</i>)	1,30
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.04.01 - Jumlah Daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan Berkategori Baik	daerah	0	14
KP 02.04.01 - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan	kegiatan	(indikator baru)	5
KP 02.09.01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	65,53
KP 02.12.07 - Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)	kabupaten/kota	127 (2023)	250
KP 02.12.07 - BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)	persen	46,45	70,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.12.07 - Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik	kabupaten/kota	17 (2023)	50
KP 02.12.07 - Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik	kabupaten/kota	135 (2023)	250
KP 02.12.08 - Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota	provinsi	38	38
KP 02.12.08 - Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota	provinsi	1 (2023)	25
KP 04.19.02 - Persentase Perempuan Kepala Desa	persen	5,76	6,76
KP 06.07.03 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	(indikator baru)	800
KP 06.07.03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	(indikator baru)	1.620
KP 07.01.01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	persen	100 (2023)	100
KP 07.01.01 - Persentase parpol penerima bantuan Keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan Keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	60
KP 07.01.02 - Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	persen	6,53	20
KP 07.09.01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berkategori Sangat Baik	provinsi	4	15
KP 07.09.02 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkategori Tuntas Paripurna	provinsi	6	15
KP 07.09.02 - Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya Berkategori Tuntas Madya	kabupaten/kota	420	203



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 07.09.02 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)	daerah (prov/kab/kota)	112	98
KP 07.09.03 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	360
KP 07.09.03 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	360
KP 07.09.03 - Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	provinsi	4	29
KP 07.09.03 - Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif	daerah (prov/kab/kota)	7	4

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 186.212,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,6	65,8
PN 07 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93,0	94,0
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.09 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		(indikator baru)	0,555
PP 02.09 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,20 (skala 5)
PP 02.09 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07	4,12 (skala 5)
PP 02.09 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75,00	77,00
PP 07.16 - Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri	persen	85,00	87,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.09.01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	71,96
KP 02.09.02 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75,00	76,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.09.02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75,00	76,00
KP 02.09.02 - Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75,00	76,00
KP 02.09.02 - Angka Pembangunan Postur Diplomasi		(indikator baru)	10
KP 02.09.02 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15,00	25,00
KP 02.09.03 - Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional	persen	(indikator baru)	40,00
KP 02.09.04 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75,00	81,00
KP 02.09.04 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75,00	80,50
KP 07.16.02 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96,00	96,10
KP 07.16.02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		97,50	98,10
KP 07.16.02 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri		98,50	98,80

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KEMENTERIAN PERTAHANAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 57.219.493,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.01 - Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI	persen	30,30	40,00
PP 02.02 - Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	100
PP 02.03 - Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan	persen	100,00	100,00
PP 02.06 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi	persen	54,22	65,67
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.01.01 - Persentase Pemenuhan Alutsista	persen	30,30	40,00
KP 02.01.02 - Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa	persen	51,30	35,00
KP 02.01.03 - Persentase Pemenuhan Peralatan Siber	persen	67,50	70,00
KP 02.01.04 - Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas	persen	69,42	71,15
KP 02.01.05 - Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista	persen	49,70	52,30
KP 02.02.01 - Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan	persen	60,00	76,00
KP 02.02.02 - Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan	persen	100,00	100,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.02.03 - Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri	persen	50,00	70,00
KP 02.03.01 - Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk	persen	(indikator baru)	30,00
KP 02.03.01 - Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik	persen	100,00	100,00
KP 02.03.02 - Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	persen	(indikator baru)	100,00
KP 02.06.05 - Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi	persen	54,22	65,67
KP 02.06.05 - Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi	persen	42,10	56,60

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 544.875,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	persen	12,88	11,71 - 12,31
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.12 - Rasio Perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,08	10,08 - 11,54
PP 07.12 - Rasio PNBPN (persen PDB)	persen PDB	2,64 (<i>unaudited</i> 2024)	2,15 - 2,38
PP 07.13 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86,00	86,50
PP 07.14 - Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	persen PDB	2,29	2,48-2,53
PP 07.14 - Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang Menjamin Keberlanjutan Fiskal	persen PDB	39,81	39,69-39,85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 05.03.02 - Waktu Penahanan (<i>dwell time</i>) di Pelabuhan Selama Fase Impor	hari	2,85	2,85 - 2,79
KP 07.09.03 - Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	persen	6,81	6,15
KP 07.12.01 - Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi	persen	90	90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 07.12.01 - Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan	persen	100	100
KP 07.12.01 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara		100,00	100,00
KP 07.12.02 - Rasio Capaian PNPB terhadap Target yang Ditetapkan (persen)	persen	117,8	90-100
KP 07.13.01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84,00	85,50
KP 07.13.02 - Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	persen	100,00	100,00
KP 07.13.02 - Alokasi TKD untuk Infrastruktur	triliun	70,4	55,6
KP 07.13.02 - Persentase Kinerja Hibah Daerah	persen	75,00	75,00
KP 07.14.01 - Imbal Hasil (<i>Yield</i>) SBN	persen	7,00	6,60-7,20
KP 07.14.01 - Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara	persen	100,00	100,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KEMENTERIAN PERTANIAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 28.995.446,6

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.10 - Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	3,22	3,80
PP 02.10 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023, angka kajian sementara BPS)	0,7731
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.10.01 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	21.008	740.163
KP 02.10.01 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	9.435	520.896
KP 02.10.02 - Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	27.362	33.440
KP 02.10.02 - Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	24,15	2.200
KP 02.10.03 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan	ton	44.010	859.313
KP 02.10.03 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan	ha	16.949	671.236
KP 02.10.04 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	6.303 (2023)	84.723
KP 02.10.04 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	0	53.975



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.10.04 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	42.201	375.137
KP 02.10.04 - Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	7.304	123.012
KP 02.10.05 - Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua	ton	655	7.994
KP 02.10.05 - Peningkatan luas panen Jagung KSPP Papua	ha	866	1.579
KP 02.10.06 - Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan	ton	19.506	929.750
KP 02.10.06 - Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan	ha	2.361	475.000
KP 02.10.07 - Lahan Baku Sawah yang dicetak	ribu ha	0	75
KP 02.10.07 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman	ribu ha	0	200
KP 02.10.10 - Produksi Daging	juta ton	4,70	5,10
KP 02.10.10 - Produksi Telur	juta ton	6,67	7,75
KP 02.10.10 - Produksi Susu	ribu ton	808,35	1.036,70
KP 02.10.11 - Produksi Padi	juta ton	53,14	54,85
KP 02.10.11 - Produksi Jagung	juta ton	20,47	22,51
KP 02.10.11 - Produksi Aneka Kacang	ribu ton	446,189	552,84
KP 02.10.11 - Produksi Buah dan Sayur	juta ton	28,52	31,85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.10.11 - Produksi Sorghum	ribu ton	17,34	18,395
KP 02.10.11 - Produksi Ubi Jalar	ton	1.385.689	1.562.972
KP 02.10.11 - Produksi Kedelai	ton	217.721	381.470
KP 02.10.13 - Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	persen	-	100,00
KP 02.10.13 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	80,00	80,30
KP 02.10.14 - Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	4
KP 02.10.16 - Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi	lembaga	123	130
KP 02.10.16 - Persentase Petani Muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (ST 2023 BPS)	22,13
KP 02.10.17 - Produksi Tanaman Obat	ton	495.767	532.171,06
KP 02.10.17 - Produksi Vanili	ton	1.579 (2023)	1.585
KP 02.10.17 - Produksi Lada	ton	64.279 (2023)	64.408
KP 02.10.17 - Produksi Pala	ton	41.444 (2023)	41.568
KP 02.10.17 - Produksi Florikultura	ribu tangkai	667.755,03	597.459,16
KP 02.10.17 - Produksi Cengkeh	ton	133.408 (2023)	133.703



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.10.17 - Produksi Kopi	ton	758.725 (2023)	786,119
KP 02.10.17 - Produksi Tebu	ton	33.216.612	39.555.979
KP 02.10.17 - Produksi Karet	ton	2.240.826 (2023)	2.470.676
KP 02.10.17 - Produksi Kakao	ton	632.117 (2023)	633.290
KP 02.10.17 - Produksi Teh	ton	116.506 (2023)	116.579
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	persen	0,67	2,04
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura	persen	0,85	1,77
KP 02.10.18 - Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan		0	3,10
KP 02.10.18 - Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,50
KP 02.10.18 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,40	78,00
KP 02.10.18 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,49
KP 02.10.18 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30
KP 02.10.18 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.725
KP 02.15.02 - Persentase Penurunan Susut Pangan	persen	3	3-5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.14.01 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	259	288
KP 05.01.05 - Produksi Kelapa Sawit	ton	226.069.542,9	243.241.575
KP 05.01.05 - Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO)	ton	52.518.781 (angka sementara)	53.817.198
KP 05.01.06 - Produktivitas Kelapa	ton/hektare	1,12 (angka sementara)	1,14
KP 05.01.06 - Produksi Kelapa	ton	2.822.118 (angka sementara 2024)	2.890.917
KP 05.01.08 - Produksi Sagu	ton	395.403 (angka sementara)	413.304
KP 05.01.08 - Produksi Ubi Kayu	ton	16.927.504	17.529.989
KP 05.01.08 - Produktivitas Sagu	ton/hektare	2,97 (angka sementara)	3,14
KP 05.01.08 - Produktivitas Ubi Kayu	ton/hektare	26,83	28,25
KP 08.03.03 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) pada Sektor Pertanian	persen	0,248 (2023)	0,187



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 417.696,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 05.01 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	persen	4,43	5,20-5,84
PP 05.02 - Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	persen	51,00	51,32
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.13.01 - Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal	persen	n/a	5,19
KP 02.14.02 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 <i>Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	perusahaan	74 (2023)	103
KP 02.15.01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (akumulatif)	96	164
KP 02.15.01 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	12
KP 02.19.04 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO2-Eq	6,75 (2022)	6,79
KP 02.22.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri	persen	50	55.12
KP 02.22.04 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	persen	41,93	50
KP 02.22.05 - Volume Reparasi Kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan-Nov 2024)	11,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.22.05 - Volume Produksi Pembuatan Kapal	ribu DWT (kumulatif)	0,98	1,2
KP 02.22.05 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan	ribu USD	830,89	939,41
KP 05.01.01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel	juta ton/tahun	27,44	33,74
KP 05.01.02 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195
KP 05.01.03 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit	juta ton/tahun	5,02	15,27
KP 05.01.04 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah	ribu ton/tahun	136,9	247,3
KP 05.01.05 - Ragam Produk Hilir Sawit	produk	193	223
KP 05.01.05 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	persen	92,0	92,5
KP 05.01.06 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	persen	40	60
KP 05.01.07 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut	persen	49,51	58,01
KP 05.01.08 - Kapasitas Produksi Pati Sagu	ton/tahun	60.000	150.000
KP 05.01.09 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara	ribu ton	59.783,45	60.444,74
KP 05.01.09 - Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	persen	-0,98 (2023)	6,51
KP 05.01.10 - Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	persen	6,16	6,82-7,26
KP 05.01.11 - Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.01.12 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	persen	0,94 (2023)	1,1
KP 05.01.13 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	persen	50	63,25
KP 05.01.14 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	persen	-0,42	2,93-3,47
KP 05.01.15 - Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	persen	5,9	6,05-6,60
KP 05.01.16 - Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	persen	4,26	4,64 - 4,94
KP 05.01.16 - Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT	juta Rupiah/orang/tahun	55,29	64,59
KP 05.01.16 - Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT	orang	3.975.905	3.957.206
KP 05.01.17 - Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	persen	6,83	6,49-6,81
KP 05.01.18 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	persen	13,34	8,71-9,47
KP 05.01.18 - Utilisasi Industri Logam Dasar	persen	76,76	79
KP 05.01.19 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional	persen	2,72 (2016)	3,18
KP 05.02.06 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	triliun Rupiah	1,65	1,81
KP 05.02.07 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	triliun Rupiah	5,99	5,99
KP 05.02.08 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar	triliun Rupiah	13,02	13,27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.02.09 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang	triliun Rupiah	3,77	4,50
KP 05.02.10 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer	triliun Rupiah	0,73	0,77
KP 05.02.11 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan	triliun Rupiah	1,18	1,56
KP 05.02.12 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)
KP 05.02.13 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	triliun Rupiah	2,22	2,40
KP 05.02.14 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun Rupiah	2,24	6,35
KP 05.02.15 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun Rupiah	1,05	1,05
KP 05.02.16 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe	triliun Rupiah	305,94	306,24
KP 05.02.17 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust	triliun Rupiah	0,33	0,64
KP 05.02.18 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun Rupiah	6,99	11,33
KP 05.02.19 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali	triliun Rupiah	466,71	468,21
KP 05.02.20 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)
KP 05.02.21 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi	triliun Rupiah	0,01	5,04
KP 05.02.22 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay	triliun Rupiah	346,33	352,65



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.02.23 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli	triliun Rupiah	0,01	0,40
KP 05.02.24 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)
KP 05.02.25 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	0,24
KP 05.05.02 - Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	persen	12,21	12,92
KP 05.05.04 - Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah		0,294 (2023)	0,282
KP 05.05.04 - Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	produk	179 (2022)	209
KP 05.05.06 - Tingkat Partisipasi Produk Elektronik Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	42,00 (2022)	51,00
KP 05.05.06 - Tingkat Partisipasi Produk Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	23,00 (2022)	25,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 3.828.923,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.11 - Pasokan Energi Primer	MTOE	273	323,20
PP 02.11 - Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,640	0,770
PP 02.11 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	14,68	16,00 - 20,00
PP 02.11 - Intensitas Energi Primer	SBM/miliar Rupiah	149,10	145,40
PP 03.02 - Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.411	1.520
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.11.01 - Jumlah Lifting Minyak Bumi	Ribu Barrel Oil Per Day/BOPD	605,50	605 - 620
KP 02.11.01 - Jumlah Produksi Batu Bara	juta ton	836,13	733
KP 02.11.01 - Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	persen	100	100
KP 02.11.01 - Jumlah Lifting Gas Bumi	Ribu Barrel Oil Equivalent Per Day/BOEPD	964	953 - 1.017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.11.02 - Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN	sambungan rumah (SR)	940.653	300.000
KP 02.11.02 - Jumlah Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi	km	22.533	22.600
KP 02.11.02 - Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	juta kl	17	19,07
KP 02.11.02 - Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi	juta kl	(indikator baru)	35,97
KP 02.11.02 - Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	ribu pelanggan	92.494	98.735
KP 02.11.02 - Deviasi Harga Jual Eceran BBM	persen	0	0
KP 02.11.02 - Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) (Persen)	persen	49	50
KP 02.11.02 - Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (jenis BBM khusus penugasan) (Persen)	persen	22	25
KP 02.11.03 - Konsumsi Biofuel	juta kl	13,15	14,36
KP 02.11.03 - Produksi Listrik Energi Terbarukan	GWH	71.349,5	54.388
KP 02.11.03 - Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/miliar Rupiah	1,04	1,44
KP 02.16.01 - Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit (kumulatif)	10	13
KP 02.19.01 - Reduksi Emisi GRK Sektor Energi	juta ton CO2-Eq	142	187
KP 03.02.03 - Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2024)	GW	100,69	106,78
KP 03.02.03 - Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik	juta ton CO2	16,94	17,23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.02.03 - Produksi Tenaga Listrik	GWh	339.459	381.496
KP 03.02.04 - Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	kms	11.146	4.130
KP 03.02.04 - Kapasitas Gardu Induk	MVA	12.276	7.270
KP 03.02.04 - Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	kms	18.014	11.083
KP 03.02.04 - Kapasitas Gardu Distribusi	MVA	2.368	1.456
KP 03.02.04 - Rasio Elektrifikasi Nasional	persen	99,83	99,90
KP 03.02.04 - System Average Interruption Duration Index (SAIDI) / System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) Nasional	(jam/pelanggan/tahun)/ (kali/pelanggan/tahun)	5,34 / 3,23	5,26 / 3,99
KP 03.02.04 - Susut Jaringan	persen	8,69 (TW III)	8,61
KP 03.02.05 - SPKLU dan Private Charging Station Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	3.202	5.971
KP 03.02.05 - SPBKLU Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.902	2.277
KP 03.02.05 - Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas	unit	155.429	100.000

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 12.201.792,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.01 - Jumlah Perjalanan Kereta Api	juta perjalanan	0,86	0,95
PP 03.01 - On Time Performance Penerbangan	persen	73,78	81,00
PP 03.01 - Peningkatan Volume Angkutan Laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen	-7,20 (2023)	12,10
PP 03.01 - Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	juta penumpang	501	538
PP 03.01 - Volume Angkutan Penyeberangan	juta kendaraan	11,50 (2023)	11,80
PP 03.01 - Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	870
PP 03.01 - Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan	persen	53,68 (2023)	67
PP 03.01 - Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	persen	85,50 (2023)	86
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.01.02 - Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928
KP 03.01.02 - Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	persen	63 (2023)	66
KP 03.01.02 - Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	95



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.01.03 - Pelabuhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (kumulatif angka dasar 2020)	lokasi	72	138
KP 03.01.03 - Penumpang Angkutan Laut Nonkomersil	ribu penumpang	1.296	1.731
KP 03.01.03 - Muatan Barang Angkutan Laut Nonkomersil	ton	986.594	807.981
KP 03.01.03 - Tingkat Keandalan Kenavigasian	persen	92,33 (2023)	95,45
KP 03.01.04 - Bandara yang Dibangun dan Dikembangkan (kumulatif)	lokasi	116 (2020-2024)	116 (2020-2026)
KP 03.01.04 - Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo	layanan	309	313
KP 03.01.04 - Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan	persen	83,49	78
KP 03.01.05 - Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	230 (2023)	238
KP 03.01.05 - Terminal Penumpang yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	113 (2023)	116
KP 03.01.05 - Lokasi Rawan Kecelakaan yang Ditangani	lokasi, kumulatif	179 (2023)	162
KP 03.01.06 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif)	kota	6 (2020-2023)	14 (2020-2026)
KP 03.01.06 - Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	juta penumpang/hari	1,40 (2023)	1,43
KP 03.01.06 - Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	juta penumpang/hari	2,989 (2023)	2,828
KP 03.01.07 - Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi	persen	92 (2023)	92,50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.01.07 - Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi	persen	85,10 (2023)	70,00
KP 05.03.01 - Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDB	persen	2,66	2,45
KP 05.03.01 - Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDB	persen	1,02	0,94
KP 05.03.01 - Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDB	persen	0,89	0,82
KP 05.03.01 - Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03
KP 05.03.01 - Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09
KP 05.03.01 - Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi Standar	lokasi (kumulatif)	6	8
KP 05.03.01 - Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas	box/ship/jam	21 (2023)	36
KP 05.03.01 - Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya	lokasi	16	13
KP 05.03.01 - Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama	juta ton	1.391	1.447
KP 05.03.03 - Indeks Peningkatan SDM Transportasi		110,10	86

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

KEMENTERIAN KESEHATAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 79.740.952,9

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.12 - Rumah Tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	persen	4,2 (2023)	1,5
PP 04.11 - Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	109
PP 04.11 - Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	13,80
PP 04.11 - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	persen	19,80	17,50
PP 04.11 - Prevalensi remaja putri anemia	persen	indikator baru)	23
PP 04.11 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	persen	(indikator baru)	20
PP 04.11 - Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	77
PP 04.11 - Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	persen	(indikator baru)	46
PP 04.13 - Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	252
PP 04.13 - Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 04.13 - Desa endemis <i>schistosomiasis</i> yang mencapai eliminasi	desa	16	21
PP 04.13 - Insidensi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,10 (2023)	0,08
PP 04.13 - Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	kab/kota	389 (2023)	440
PP 04.13 - Persentase Diabetes dalam Pengendalian	persen	(indikator baru)	17,5
PP 04.13 - Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	persen	18,9	25
PP 04.13 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	(indikator baru)	50
PP 04.13 - Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4
PP 04.13 - Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	(indikator baru)	100
PP 04.13 - Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4
PP 04.13 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	11,4
PP 04.14 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	50
PP 04.14 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	96
PP 04.14 - Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	200
PP 04.14 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	440



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 04.14 - Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	62 (TW III 2024)	70
PP 04.14 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	(indikator baru)	15
PP 04.15 - Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	30
PP 04.15 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28,00	28,00
PP 04.15 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37,00	45,00
PP 04.15 - Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	persen	12	22
PP 04.15 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	63	71
PP 04.15 - Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,96
PP 04.15 - Pengeluaran Kesehatan Total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,4
PP 04.15 - Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	(indikator baru)	35
PP 04.15 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	55
PP 04.19 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,094	0,072
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.12.05 - Kabupaten/Kota dengan Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat	kab/kota	65 (2023)	150



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.12.05 - Kabupaten/Kota Kualitas Air Minum pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	persen	65 (2023)	100
KP 02.12.08 - Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	kabupaten/kota	4 (2023)	60
KP 02.18.01 - Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kabupaten/kota	4 (2023)	60
KP 04.11.01 - Persentase persalinan di fasyankes	persen	76,66	89,00
KP 04.11.01 - Persentase kabupaten/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	35
KP 04.11.01 - Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONEK sesuai standar	persen	(indikator baru)	30
KP 04.11.01 - Persentase kabupaten/kota dengan CFR <i>direct obstetric</i> (eklamsi & pendarahan postpartum) < 1%	persen	(indikator baru)	35,00
KP 04.11.01 - Persentase <i>antenatal care</i> (ANC) 6 kali (K6)	persen	(indikator baru)	82
KP 04.11.01 - Cakupan <i>Antenatal Care</i> (ANC) sesuai standar (12T)	persen	(indikator baru)	66,00
KP 04.11.01 - Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	25
KP 04.11.01 - Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan	persen	49,2 (2023)	55
KP 04.11.01 - Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	45
KP 04.11.01 - Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	8,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.11.01 - Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	11,63
KP 04.11.01 - Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	92
KP 04.11.01 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	85
KP 04.11.01 - akupan Anak Usia 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	persen	63,69	85,00
KP 04.11.02 - Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	8,50 (2023)	7,70
KP 04.11.02 - Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	10,5
KP 04.11.02 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	9,67 (TW I 2025)	13
KP 04.11.02 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,60 (2023)	76
KP 04.11.02 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	55,5 (2023)	64
KP 04.11.02 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,90 (2023)	76,00
KP 04.11.02 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	23,04 (TW I 2025)	55
KP 04.11.03 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	67
KP 04.11.03 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	(indikator baru)	35
KP 04.11.03 - Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	20.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.11.03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	(indikator baru)	20
KP 04.11.03 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	55
KP 04.11.03 - Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	75
KP 04.11.03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	25
KP 04.11.03 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	persen	(indikator baru)	20
KP 04.11.03 - Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP	persen	(indikator baru)	35
KP 04.11.04 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	(indikator baru)	60
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	(indikator baru)	70
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	persen	(indikator baru)	55
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	(indikator baru)	35
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	(indikator baru)	45
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	(indikator baru)	55
KP 04.13.01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	81,00	90,00
KP 04.13.01 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Treatment Success Rate)	persen	85,00	90,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.13.01 - Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah	persen	19,20	80,00
KP 04.13.01 - Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan	persen	92,00	95,00
KP 04.13.02 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86
KP 04.13.02 - Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90
KP 04.13.02 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5
KP 04.13.02 - Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis	persen	83,6 (2023)	90,4
KP 04.13.03 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90
KP 04.13.03 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	425
KP 04.13.04 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%	kab/kota	32	70
KP 04.13.04 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	(indikator baru)	15
KP 04.13.04 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	(indikator baru)	50
KP 04.13.04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	(indikator baru)	40
KP 04.13.04 - Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90
KP 04.13.04 - Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	persen	6 (2023)	15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.13.05 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	68
KP 04.13.05 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	40,3
KP 04.13.05 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	17
KP 04.13.05 - Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	427
KP 04.13.05 - Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	325
KP 04.13.05 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	(indikator baru)	6
KP 04.13.06 - Kab/Kota dengan kualitas Air Minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	150
KP 04.13.06 - Kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota)	kab/kota	(indikator baru)	100
KP 04.13.06 - Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kab/kota	4 (2023)	60
KP 04.13.06 - Kabupaten/kota sehat	kab/kota	136	228
KP 04.14.01 - Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	472
KP 04.14.01 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	persen	(indikator baru)	70
KP 04.14.01 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	70 (2023)	76
KP 04.14.01 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	40 (2023)	54



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.14.01 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	(indikator baru)	162
KP 04.14.02 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96 (TW II 2024)	70
KP 04.14.02 - Persentase penurunan kekosongan (<i>stock out</i>) obat dan vaksin di fasyankes	persen	(indikator baru)	15
KP 04.14.02 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	(indikator baru)	92
KP 04.14.02 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	persen	(indikator baru)	50
KP 04.14.02 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	(indikator baru)	50
KP 04.14.03 - Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	(indikator baru)	100
KP 04.14.03 - Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	(indikator baru)	100
KP 04.14.03 - Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	(indikator baru)	95
KP 04.15.01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30,00	40,00
KP 04.15.01 - Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18,00	35,00
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	(indikator baru)	20
KP 04.15.01 - Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18,5 (Des 2024)	50
KP 04.15.01 - Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	60



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.15.01 - Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	40
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	30	28,00
KP 04.15.02 - Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	31,5	60
KP 04.15.02 - Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	7,80	45,00
KP 04.15.02 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	(indikator baru)	16
KP 04.15.02 - Kabupaten/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	30
KP 04.15.02 - Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/kota	65	90
KP 04.15.02 - Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40,00	60,00
KP 04.15.02 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/kota	(indikator baru)	32
KP 04.15.02 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	10
KP 04.15.02 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37,00	45,00
KP 04.15.03 - Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	kab/kota	6	37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.15.03 - Jumlah Kab/Kota dengan Jenis Dokter Spesialis pada RS Pemerintah sesuai Standar	kab/kota	250	290
KP 04.15.03 - Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	0,18	0,2
KP 04.15.03 - Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	11,38	20
KP 04.15.04 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5
KP 04.15.05 - Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	(indikator baru)	75
KP 04.15.05 - Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	(indikator baru)	20
KP 04.15.05 - Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	persen	49	70
KP 04.15.05 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan <i>online</i> nasional	persen	15	30
KP 04.15.05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	layanan	2	7
KP 05.01.11 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	58
KP 05.01.14 - Proporsi Jenis Alkes yang dapat Diproduksi Dalam Negeri	persen	56	65
KP 08.03.04 - Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim	persen	(indikator baru)	11



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

KEMENTERIAN AGAMA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 19.684.167,4

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.03 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	75,00
PP 04.03 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	(indikator baru)	15,00
PP 08.01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	77,14
PP 08.01 - Indeks Layanan Keagamaan		86,51	87,51
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	50,08
KP 04.01.03 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	72,32
KP 04.01.04 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.397
KP 04.02.01 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	33,98



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2026
KP 04.02.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	30,02
KP 04.02.03 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	58,07; 50,91 (2023)	59,71; 52,97
KP 04.02.05 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	63,94
KP 04.02.05 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	70,35
KP 04.02.06 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	55,21
KP 04.03.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	(indikator baru)	40,00
KP 04.03.02 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	60
KP 04.03.03 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	(indikator baru)	15,00
KP 04.04.01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	60,43
KP 04.04.02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	81,70
KP 04.05.01 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	43,40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.05.03 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	37,71
KP 08.01.01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52	84,74
KP 08.01.01 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (Agama dan Etnis)		61,78 (2021)	66,99
KP 08.01.01 - Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	persen	27	50
KP 08.01.01 - Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga	persen	0,5 (2022)	0,8
KP 08.01.02 - Persentase Rekomendasi <i>Early Warning System</i> (Keagamaan) yang di Tindak Lanjuti	persen	10	40
KP 08.01.02 - Persentase Provinsi yang Memperoleh Nilai Kerukunan Umat Beragama dengan Kategori Sangat Tinggi	persen	24	35
KP 08.01.03 - Persentase Lembaga Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan yang Memenuhi Standar Pengelolaan	persen	40	46
KP 08.01.04 - Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar	persen	66,69	68,02
KP 08.01.05 - Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53	85,75
KP 08.01.06 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan Haji dalam negeri; Layanan Haji luar negeri		90,45 (2022); 88,20	91,25; 88,75
KP 08.01.06 - Persentase Lembaga Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah yang Terakreditasi (A): Lembaga Penyelenggara Haji khusus; Lembaga Penyelenggara Umrah	persen	82,00; 96,000	82,10; 96,014
KP 08.01.08 - Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan	persen	1	3



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 08.01.08 - Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang Akuntabel dan Profesional	persen	78	85

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 426.924,4

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 06 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	9,07 (2023)	10,40
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.20 - Proporsi Tenaga Kerja Hijau	persen	2,62 (2023)	2,76 – 2,83
PP 04.07 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	1,60
PP 04.19 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	56,42	56,40 - 59,31
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.20.01 - Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	kebijakan	0	1
KP 02.20.01 - Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	kerja sama	0	1
KP 02.20.02 - Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya	orang	120.000 (2023)	500.000
KP 02.20.02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i> yang Ditetapkan	dokumen	(indikator baru)	1
KP 04.07.03 - Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha	persen	42,53	45,00
KP 04.07.04 - Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	61,90	63,60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.07.04 - Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	orang	11.797.247	15.389.510
KP 04.07.04 - Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	560.773	536.822
KP 04.17.02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	2,17	1,77
KP 06.02.02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	13,05	17,63
KP 06.02.02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	53,44	56,10

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

KEMENTERIAN SOSIAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 78.633.211,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.20 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia	persen	(indikator baru)	61,50
PP 04.20 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas	persen	(indikator baru)	39,80
PP 06.02 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga/tahun	0	1,5 juta
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.01.04 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat	orang	(indikator baru)	30.000
KP 04.15.04 - Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,70 (2023)	96,80
KP 04.20.01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,65
KP 06.02.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	63	70
KP 06.02.01 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7,50	10,00
KP 06.02.01 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	keluarga/tahun	10 ribu	700 ribu
KP 06.02.03 - Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	persen	25	30
KP 06.02.03 - Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi	persen	37	42



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 06.03.02 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa/tahun	0	1.500.000

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 8.361.983,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.06.02 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80,00	81,00
KP 02.06.03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91,00	93,00
KP 02.10.09 - Volume Produksi Ikan Budi Daya	juta ton	6,37	7,15
KP 02.10.09 - Volume Produksi Perikanan Tangkap	juta ton	7,39	6,47
KP 02.10.12 - Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kap/tahun	25,07 (2023)	26,85
KP 02.10.13 - Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan	persen	92,24	72,00
KP 02.10.16 - Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi	lembaga	15	21
KP 02.16.01 - Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil		49,56 (2023)	52,00
KP 02.16.01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,44
KP 02.16.04 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau <i>Appendix</i> CITES		62,40 (2023)	68,95
KP 02.18.02 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,60	296,00
KP 02.19.03 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.22.01 - Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	91,17	34,69
KP 02.22.01 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	83,00
KP 02.22.01 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,52
KP 02.22.01 - Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80
KP 02.22.02 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (kumulatif)	juta ha	16,50	19,10
KP 02.22.02 - Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	juta ha	29,20	30,70
KP 02.22.03 - Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00-6,00
KP 02.22.03 - Volume Produksi Ikan	juta ton	13,95 (2023)	13,62
KP 02.22.03 - Volume Produksi Olahan Perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,83
KP 02.22.03 - PDB Perikanan	triliun Rupiah	554,04 (2023)	626,04
KP 02.22.04 - Volume Produksi Garam	juta ton	2,00 (2024)	2,50
KP 02.22.04 - Produktivitas Lahan Garam Rakyat	ton/ha	83	85
KP 02.22.07 - Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	persen	74,17 (2023)	76
KP 05.01.07 - Volume Produksi Rumput Laut	juta ton	10,81	12,22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.04 - Nilai Ekspor Hasil Perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,70
KP 05.05.04 - Nilai Ekspor Rumput Laut	juta USD	433,72 (2023)	647,00
KP 05.05.04 - Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut	persen	34,31	49,90
KP 08.03.01 - Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		(indikator baru)	60

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 45.785,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	43	41
PN 02 - Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,82
PN 03 - Devisa Pariwisata	miliar USD	16,71	22,00–24,70
PN 03 - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	24,50	37,95
PN 03 - Rasio PDB Pariwisata	persen	3,72 (2022)	4,60–4,70
PN 04 - Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,91	4,44–4,96
PN 05 - Biaya Logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,30
PN 05 - Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen PDB	29,15	29,00
PN 05 - Rasio PDB Industri Pengolahan	persen	18,98	21,20
PN 07 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,50±1,00
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.14 - Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	persen	8	9-10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 02.15 - Tingkat input material sirkular	persen	9 (indikator baru)	9,40
PP 04.19 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu Rupiah	laki-laki: 16.736; perempuan: 9.579 (2023)	laki-laki: 17.138; perempuan: 10.086
PP 05.03 - Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,09
PP 05.03 - Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	hari	1,80	1,60
PP 07.15 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,50±1,00
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.09.06 - Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses rewiu dari Komite OECD (2026-2028)	persen	-	30,00
KP 02.09.06 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)	persen	-	-
KP 02.09.06 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027-2029)	persen	-	-
KP 03.04.03 - Indeks Literasi Keuangan	persen	54,23	60,27
KP 05.02.01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun Rupiah	0,55	1,51
KP 05.02.02 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun Rupiah	5,61	7,23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.02.03 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun Rupiah	4,50	13,70
KP 05.02.05 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun Rupiah	26,50	21,68

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.506,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 04 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun	2,11	2,10
PN 04 - Harapan Lama Sekolah	tahun	13,21	13,36
PN 04 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,421	0,394
PN 04 - Indeks Pembangunan Gender		91,85	92,11-92,21
PN 04 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	73,83
PN 04 - Indeks Pembangunan Pemuda		62,88	67,69
PN 04 - Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	72,33
PN 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	medali	2	n/a
PN 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	medali	1	n/a
PN 04 - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	persen	92,94 (2023)	94,50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PN 04 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	persen	68,42 (2023)	69,50
PN 04 - Peringkat Indeks Inovasi Global	peringkat	54	52
PN 04 - Peringkat pada ASEAN Para Games	peringkat	1 (2023)	1-2
PN 04 - Peringkat pada Asian Games	peringkat	13 (2023)	9-11
PN 04 - Peringkat pada Asian Para Games	peringkat	6 (2023)	5-7
PN 04 - Peringkat pada SEA Games	peringkat	3 (2023)	n/a
PN 04 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi	persen	68,14	68,50
PN 04 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,06	10,80 - 11,94
PN 04 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	10,20	11,49
PN 04 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	tahun	9,22	9,45
PN 04 - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi		63,06; 55,92	65,89; 58,86
PN 04 - Rata-rata Nilai PISA: Membaca; Matematika; Sains		359; 366; 383 (2022)	396; 404; 416
PN 04 - Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,15	74,68
PN 08 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	66,15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PN 08 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,136
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.01 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	anak tidak sekolah	3.777.202	3.546.145
PP 04.01 - Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	68,07
PP 04.02 - <i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)		87,70	89,06
PP 04.02 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	46,57; 41,42	51,67; 45,68
PP 04.04 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	44,84
PP 04.10 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK		60,49 (2023)	64,36
PP 04.19 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	laki-laki: 43,78; perempuan: 37,64 (2024)	laki-laki: 44,56; perempuan: 38,60

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 6.064,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,26
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.11 - <i>Profit Margin Ratio</i> (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,63
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.11.01 - <i>Total Asset Turnover</i> BUMN	kali (x)	0,282 (2023)	0,306
KP 07.11.02 - Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3	persen	(indikator baru)	65,20

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 69.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.17 - Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	69,74
PP 04.17 - Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	83,42
PP 04.17 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki : 31,11 perempuan: 36,31	laki-laki : 24,63 perempuan: 31,06
PP 04.17 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,48
PP 04.19 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 3; provinsi: 2; kab/kota: 3	KL: 7; provinsi: 6; kab/kota: 11
PP 04.19 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	persen	6,60	5,90
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.16.01 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,76
KP 04.16.01 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.17.01 - Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; Utama: 22; Nindya: 69; Madya: 125; Pratama: 139	KLA: 0; Utama: 21; Nindya: 78; Madya: 134; Pratama: 145
KP 04.17.01 - Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	358
KP 04.17.01 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,16
KP 04.17.01 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	6,83
KP 04.17.02 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	46,81	85
KP 04.17.02 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,22
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 27,03; perempuan: 33,07	laki-laki: 21,42; perempuan: 27,99
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 1,83; perempuan: 2,67	laki-laki: 1,33; perempuan: 2,02
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 2,18; perempuan: 2,17	laki-laki: 1,48; perempuan: 2,03
KP 04.17.02 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	5,90	5,18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.19.01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,248	0,231
KP 04.19.02 - Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya	persen	Pratama 14; Madya 16	Pratama 15; Madya 17
KP 04.19.02 - Persentase Perempuan di Posisi Managerial	persen	35,02	40,23
KP 04.19.03 - Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan	persen	22,09	20,00
KP 04.19.03 - Rasio Kewirausahaan Perempuan	persen	1,70 (2023)	1,89
KP 04.19.04 - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	31.655-33.094
KP 04.19.04 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85,00
KP 04.19.04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	79,61
KP 04.19.04 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	16,69
KP 04.19.04 - Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP	persen	46,30	41,42
KP 04.19.04 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,70	5,42
KP 04.19.04 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,49



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.19.05 - Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender	prov/kab/kota	(indikator baru)	prov: 14; kab/kota: 38
KP 04.19.05 - Persentase Anggaran Responsif Gender	persen	K/L: 4,04; prov/kab/ kota:10,0	K/L: 6,40; prov/kab/ kota: 12,4
KP 04.19.05 - Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender	persen	K/L: 3,80	K/L: 5,50

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 89.110,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		75,69	72,80
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.10 - Indeks Pemerintah Digital		3,12	1,70
PP 07.08 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional		71	71
PP 07.08 - Indeks Pelayanan Publik		4,02	3,48
PP 07.07 - Indeks Sistem Merit ASN		0,54	0,62
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.10.04 - Jumlah Layanan Publik Prioritas yang Terintegrasi dalam Portal Pelayanan Publik	layanan	0	20
KP 07.10.03 - Persentase ASN dengan Kompetensi Digital Optimal	persen	0	60,00
KP 07.10.01 - Jumlah Lembaga yang Menerapkan Arsitektur Pemerintah Digital	lembaga	0	62
KP 07.10.01 - Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang Ditetapkan	kebijakan	0	2
KP 07.08.02 - Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 07.08.02 - Persentase Instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	85,24	86,00
KP 07.08.02 - Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi		3,97	3,44
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik Kota		4,05	3,70
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik K/L		4,39	3,76
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik Kabupaten		3,67	3,31
KP 07.07.06 - Persentase Rekomendasi kebijakan Hasil Evaluasi Manajemen ASN yang Dimanfaatkan	persen	0	0
KP 07.07.06 - Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.05 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.04 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 07.07.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00
KP 07.07.01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	(indikator baru)	20,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

BADAN INTELIJEN NEGARA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 243.515,3

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.04 - Fragile State Index		63,70	61,90
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.04.02 - Cakupan Deteksi Dini Intelijen	persen	(indikator baru)	100,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 2.343.987,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.05 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber		(indikator baru)	0,73
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.05.01 - Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi	persen	(indikator baru)	50,00
KP 02.05.02 - Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi	persen	(indikator baru)	14,00
KP 02.05.03 - Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE		2,59	2,94
KP 02.05.03 - Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian		(indikator baru)	3,20
KP 02.05.04 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional		(indikator baru)	0,75

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

BADAN PUSAT STATISTIK

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 97.975,3

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.08.02 - Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	persen	0	67,00
KP 07.08.02 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,35	2,45

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 157.544,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		34,25 (2023)	41,26
PN 02 - Indeks Ekonomi Hijau		60,37 (2023)	71,8
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.19 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	persen	17,47 (2023)	19,07
PP 02.19 - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	persen	28,53 (2023)	27,35
PP 02.22 - IBEI Pilar Ekonomi		22,19 (2023)	26,90
PP 02.22 - IBEI Pilar Lingkungan		31,27 (2023)	36,68
PP 02.22 - IBEI Pilar Sosial		55,19 (2023)	59,82
PP 06.01 - Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.09.04 - Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN	persen	35,29	70,59



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.20.02 - Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan	persen	73,00 (2023)	80,00
KP 04.20.02 - Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan	persen	18,00 (2023)	35,00
KP 06.01.01 - Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20
KP 06.01.02 - Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20
KP 07.08.02 - Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	persen	66,30	72,00
KP 07.08.03 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	persen	0	35,00
KP 07.10.05 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia		0	71-90
KP 07.14.02 - Jumlah Peraturan KPBU yang Ditetapkan	peraturan	1	1
KP 07.14.02 - Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi yang Dikembangkan	sistem informasi	1	1

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.382.624,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 06.03 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	persen	4,96	46,98
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.17.04 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS	persen	5,85	19,95
KP 02.17.04 - Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	persen	70,38	75,52
KP 02.17.07 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	persen	50	54
KP 06.03.03 - Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan	persen	46,16	41
KP 06.03.03 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	persen	46,64	43
KP 06.03.03 - Penurunan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah untuk petani/nelayan		0,0057	0,0034
KP 07.02.04 - Persentase penyelesaian Kasus pertanahan	persen	57,63 (Mei 2025)	52,50

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 49.082,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.10.01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,42 (2023)	71
KP 04.10.02 - Tingkat Kegemaran Membaca		66,67 (2023)	72,50

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 5.464.044,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 01.02 - Indeks Kemerdekaan Pers		69,36	70,50
PP 01.02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75,65	76,25
PP 01.02 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		69,80 (2023)	72,00
PP 03.02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional		5,90 (2023)	6,15
PP 03.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)		49,20 (2022)	51,23
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.01.02 - Persentase Konten Komunikasi Publik yang Dapat Memperkuat Kohesivitas Sosial Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	persen	0	80,00
KP 01.02.01 - Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku		3,22	3,20
KP 01.02.01 - Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers	persen	65,80	66,50
KP 01.02.01 - Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	persen	65,69	66,50
KP 01.02.01 - Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik	persen	63,74	64,50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 01.02.01 - Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers	persen	70,12	71,00
KP 01.02.01 - Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan	persen	69,08	70,00
KP 01.02.01 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers	orang	2.015	1.887
KP 01.02.02 - Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi SKPN	dokumen	11	3
KP 01.02.02 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital	orang	141.300	200.300
KP 01.02.02 - Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat	persen	77,48	77,98
KP 01.02.02 - Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	persen	75,68	77,98
KP 01.02.02 - Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik	persen	76,25	76,75
KP 01.02.02 - Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik	persen	79,92	80,42
KP 01.02.02 - Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik	persen	76,33	76,83
KP 02.14.001 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)	persen	3	3,71
KP 02.14.001 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)	persen	79 (2023)	85
KP 02.14.002 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis		39,12 (2022)	40,70
KP 02.14.002 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	persen	0	8
KP 02.14.002 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	persen	4,3	4,3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.02.01 - Jangkauan Jaringan Fiber Optik per Kecamatan	persen	70,53 (2023)	82,00
KP 03.02.01 - Integrated Index for Postal Development (2IPD)		50 (2022)	65
KP 03.02.01 - Jangkauan Jaringan Pitalebar Bergerak (Mobile Broadband) per Populasi	persen	97,16 (2023)	97,50
KP 03.02.01 - Pelanggan Terlayani Jaringan Pitalebar Tetap (Fixed Broadband) terhadap Total Rumah Tangga	persen	20,82 (2023)	35,00
KP 03.02.01 - Pengguna Internet	persen	79,50	82,70
KP 03.02.01 - Kecepatan Internet Jaringan Pitalebar Tetap (Fixed Broadband)	mbps	32,10	45,00
KP 03.02.01 - Kecepatan Internet Jaringan Pitalebar Bergerak (Mobile Broadband)	mbps	38,91 (2023)	60,00
KP 03.02.01 - Rasio Harga Layanan Jaringan Pitalebar Tetap terhadap Pendapatan per Kapita	persen	8,41 (2021)	4,00
KP 03.02.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat		51,75 (2022)	52,12
KP 03.02.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah		51,13 (2022)	54,85
KP 03.02.02 - Kapasitas Pusat Data Perkapita	watt perkapita	0,74	2,81
KP 03.02.02 - Indeks Ruang Digital Kondusif		0,00	3,20
KP 04.19.03 - Pilar Literasi Digital pada IMDI	persen	laki-laki: 3,56; perempuan: 3,52 (2023)	laki-laki: 3,65; perempuan: 3,64
KP 05.03.03 - Pertumbuhan Sektor Pos Logistik	persen	9,16	10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.05 - Nilai Ekspor Jasa Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi	miliar USD	3,74	3,12
KP 07.10.02 - Persentasi Instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	(indikator baru)	92,00
KP 07.10.02 - Persentase K/L/D yang Mengimplementasikan SPLP	persen	(indikator baru)	7,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 13.720.127,9

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.07 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3,39 (2023)	3,70
PP 02.08 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian		85,77 (2023)	86,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.07.01 - Indeks Harkamtibmas		3,28 (2023)	3,70
KP 02.07.02 - Crime Rate	kasus kejahatan per 100.000 penduduk	214 (2023)	195
KP 02.07.02 - Clearance Rate Tindak Pidana	persen	74,00 (2023)	76,00
KP 02.08.01 - Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	persen	(indikator baru)	81,00
KP 02.08.02 - Indeks SPBE		3,00 (2023)	3,40
KP 02.08.02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri	persen	70 (2023)	72,00
KP 02.08.03 - Jumlah Pusat Pendidikan Polwan	unit	1	1
KP 02.08.03 - Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan	orang	805	805



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.08.04 - Indeks Profesionalitas SDM Polri		(indikator baru)	71,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 392.266,9

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.14 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	73,8
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.13.05 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	(indikator baru)	77
KP 04.14.03 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	persen	13 (2023)	28
KP 04.14.03 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	77,8 (2023)	79
KP 04.14.03 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	73,3 (2023)	76
KP 04.14.03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	91
KP 04.14.03 - Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	66
KP 04.14.03 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	70
KP 04.14.03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	63

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 10.050,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.01.03 - Performa Pimpinan Tingkat Pusat dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional		82,88 (2023)	85,88-90,41

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 272.133,9

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 05.04 - Nilai PMA dan PMDN (Rp.Triliun)	triliun Rupiah	1.714,2	2.041,31-2.125,15
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.22.03 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	juta Rupiah	220.600	610.846
KP 02.22.03 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia	juta Rupiah	77.361	522.042
KP 02.22.03 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang	juta Rupiah	659.210	457.541
KP 02.22.04 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam	juta Rupiah	2.280.864	8.624.751
KP 05.01.01 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel	juta Rupiah	113.770.000	55.200.000
KP 05.01.02 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga	juta Rupiah	45.720.000	48.078.000
KP 05.01.03 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit	juta Rupiah	10.790.000	12.866.000
KP 05.01.04 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah	juta Rupiah	500.000	520.000
KP 05.01.05 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit	juta Rupiah	44.090.000	1.659.739
KP 05.01.06 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa	juta Rupiah	4.492.915	454.674



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.01.07 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut	juta Rupiah	230.000	532.800
KP 05.01.09 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi	juta Rupiah	17.460.000,00	39.843.024,52
KP 05.01.09 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi	juta Rupiah	16.114.108,34	23.399.871,54
KP 05.01.10 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika	juta Rupiah	1.290.000	1.561.000
KP 05.01.18 - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja	juta Rupiah	9.600.000	10.765.000
KP 05.04.01 - Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	triliun Rupiah	721,3	887,97-977,90
KP 05.04.01 - Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	(persen total nilai PMA/PMDN)	47,5	48,26-48,60
KP 05.04.01 - Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	triliun Rupiah	378,2	317,24-338,44
KP 05.04.01 - Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	triliun Rupiah	407,8	540,76-569,13
KP 05.04.02 - Nilai PMA Berorientasi Ekspor	triliun Rupiah	164,6	176,10-190,01
KP 05.04.02 - Nilai PMDN Berorientasi Ekspor	triliun Rupiah	56,2	62,99-67,90
KP 05.04.03 - Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	persen	52,2	52,14-52,37

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika		1,73	1,70
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.06 - Indeks P4GN		63,60 (2023)	64,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.06.01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika		(indikator baru)	59,50
KP 07.06.02 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi		3,63 (2023)	3,61
KP 07.06.03 - Indeks Ketahanan Diri Remaja		53,50	61,00
KP 07.06.04 - Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika	persen	(indikator baru)	91,00
KP 07.06.06 - Persentase Jumlah Provinsi yang Memiliki Kemampuan Intelijen Minimal	persen	(indikator baru)	8,00
KP 07.06.07 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	perkara	20	30

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 79.995,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.11 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	persen	83,9	85,3
PP 04.16 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,4	65,8
PP 04.16 - Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,3	22,5
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.11.01 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan	18,00	17,88
KP 04.11.01 - Persentase KB Pasca Persalinan	persen	48,9	60
KP 04.11.02 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	persen	74,20 (2023)	80,00
KP 04.11.03 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	persen	61,7	61,9
KP 04.11.03 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	persen	11,1	10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.11.03 - Persentase peseta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	25,5	26,0
KP 04.16.01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	55,06	56,16
KP 04.16.01 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	persen	(indikator baru)	51
KP 04.16.01 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	persen	32,38	51,00
KP 04.16.01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		84,60	85,70
KP 04.16.02 - Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	persen	65,97	75,00
KP 04.16.02 - Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	(indikator baru)	20
KP 04.16.03 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga		54,0	56,41
KP 04.16.03 - Indeks Kerentanan Keluarga		8,5	8,4
KP 04.20.01 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	persen	8,19	12,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 14.894,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.05.01 - Jumlah Kebijakan Diskriminatif yang Ditindaklanjuti	kebijakan	10	10
KP 01.05.02 - Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	persen	37,60 (2023)	40,60

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.160.152,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 08.03.02 - Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	persen	(indikator baru)	84
KP 08.04.02 - Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana ke Publik	menit	3	<3

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 130.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.19 - Persentase Anggota Legislatif	persen	laki-laki: 77,54; perempuan: 22,46	laki-laki: 77,29; perempuan: 22,71
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.04.02 - Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	orang	0	69.125
KP 07.01.03 - Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	persen	(indikator baru)	73
KP 07.01.04 - Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif	persen	(indikator baru)	96

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 55.716,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.05.04 - Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU	persen	75,00	85,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.625.990,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.10.05 - Persentase Cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia	persen	0	28,90
KP 07.10.05 - Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	persen	0	7,42
KP 07.10.05 - Persentase IGT yang Termanfaatkan	persen	0	29,80

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 43.486,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 05.05.08 - Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI	persen	3,109 (2023)	3,7
KP 05.05.08 - Persentase Produk ber-SNI	persen	10	12,5

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 7.756,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.17.06 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola	fasilitas	0	2

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.08.02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang Baik	persen	23,73	40

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 85.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 08.02.06 - Indeks Budaya Tertib Arsip		70,24	73,86
KP 08.02.06 - Indeks Memori Kolektif Bangsa		69,10	72,80

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 299.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.08.03 - Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	51,46
KP 07.08.03 - Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	44,74
KP 07.08.03 - Persentase Kab/Kotadengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	17,72
KP 07.08.03 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	predikat	0	optimal (61-90)

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 302.779,8

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 05 - Ekspor Barang dan Jasa	persen PDB	22,18	22,0
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 05.05 - Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia	persen	1,11 (2023)	1,18
PP 05.05 - Nilai Ekspor Jasa Indonesia	miliar USD	23,10 (2022)	32,62
PP 05.05 - Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	0,81 (2022)	1,05
PP 05.05 - Nilai Total Pembelian Perdagangan Antarwilayah	triliun Rupiah	1.622 (2022)	2.133
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.09.04 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	PTA/FTA/CEPA	19	24
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Sumatera	triliun Rupiah	205 (2022)	233
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Jawa	triliun Rupiah	1.059 (2022)	1.395
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Bali-Nusra	triliun Rupiah	51 (2022)	108
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Kalimantan	triliun Rupiah	121 (2022)	173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Sulawesi	triliun Rupiah	135 (2022)	165
KP 05.05.01 - Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Papua-Maluku	triliun Rupiah	51 (2022)	59
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	persen	11,63 (2022)	12,27
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	persen	12,48 (2022)	13,59
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	persen	9,23 (2022)	10,36
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	persen	10,12 (2022)	10,84
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	persen	10,78 (2022)	12,42
KP 05.05.01 - Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	persen	10,63 (2022)	12,43
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Sumatera	triliun Rupiah	1.073	1.511
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Jawa	triliun Rupiah	1.616	2.176
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Bali-Nusra	triliun Rupiah	52	86
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Kalimantan	triliun Rupiah	728	1.401
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Sulawesi	triliun Rupiah	458	630
KP 05.05.01 - Nilai Ekspor Barang di Pulau Papua-Maluku	triliun Rupiah	322	365
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sumatera		0,42 (2022)	0,28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa		0,09 (2022)	0,05
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali-Nusra		0,37 (2022)	0,24
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Kalimantan		0,60 (2022)	0,41
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sulawesi		0,53 (2022)	0,36
KP 05.05.01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua-Maluku		0,74 (2022)	0,58
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Sumatera	unit kumulatif	330.700 (2022)	547.700
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Jawa	unit kumulatif	2.288.300 (2022)	3.789.900
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra	unit kumulatif	125.300 (2022)	207.600
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Kalimantan	unit kumulatif	132.000 (2022)	218.700
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Sulawesi	unit kumulatif	109.700 (2022)	181.700
KP 05.05.01 - Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku	unit kumulatif	10.100 (2022)	16.700
KP 05.05.02 - Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Indonesia terhadap Total Ekspor Produk Indonesia	persen	42,75	25,52
KP 05.05.02 - Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Dunia	persen	0,62 (2023)	0,78
KP 05.05.02 - Nilai Ekspor Barang-Barang Berkategori Hijau (Environmental Goods)	miliar USD	26,15	21,49
KP 05.05.03 - Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi terhadap Dunia	persen	1,35 (2022)	1,48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.03 - Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	pelaku usaha (kumulatif)	20.533 (2022)	23.047
KP 05.05.03 - Persentase Usaha e-commerce yang Melakukan Ekspor	persen	0,85 (2022)	1,14
KP 05.05.04 - Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Pertanian terhadap Dunia	persen	2,96 (2022)	3,45
KP 05.05.04 - Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam terhadap Dunia	persen	2,38 (2022)	2,70
KP 05.05.05 - Nilai Ekspor Jasa bisnis lainnya	miliar USD	8,74	8,88
KP 05.05.05 - Nilai Perdagangan Komoditas Digital	miliar USD	6,34	11,71
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara yang Tergabung dalam RCEP	miliar USD	172,8 (2023)	200,6
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara yang Tergabung dalam ASEAN	miliar USD	53,1 (2023)	61,6
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	miliar USD	2,8 (2023)	3,2
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA	miliar USD	3,2 (2023)	3,7
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA	miliar USD	20,8 (2023)	24,1
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA	miliar USD	2,6 (2023)	3,1
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA	miliar USD	10,3 (2023)	12,0
KP 05.05.07 - Nilai Ekspor Barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA	miliar USD	0,31 (2023)	0,36



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 05.05.08 - Indeks Keberdayaan Konsumen		53,23 (2022)	66

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 852.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.09 - Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	persen	73,38 (2023)	76-80
PP 04.09 - Peringkat pada Youth Olympic Games	peringkat	83 (2018)	81-83
PP 04.09 - Peringkat pada Asian Youth Games	peringkat	15 (2013)	n/a
PP 04.09 - Peringkat pada Asian Youth Para Games	peringkat	5 (2021)	n/a
PP 04.18 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	persen	63,03	68,55
PP 04.18 - Angka Kesakitan Pemuda	persen	6,80	5,91
PP 04.18 - Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil	persen	10,77	10,49
PP 04.18 - Persentase Usia Muda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	persen	23,78	23,58
PP 04.18 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	80,67	81,21
PP 04.21 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games	medali	87 emas/ 80 perak/ 109 perunggu (2023)	n/a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 04.21 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	medali	159 emas/ 148 perak/ 94 perunggu (2023)	159 emas/ 148 perak/ 94 perunggu
PP 04.21 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games	medali	7 emas/ 11 perak/ 18 perunggu (2023)	7 emas/ 11 perak/ 18 perunggu
PP 04.21 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	medali	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu (2023)	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu
PP 04.22 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	33,62	39,41
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.09.03 - Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	provinsi	16 (2023)	19
KP 04.09.03 - Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk	kabupaten/kota	24 (2023)	34
KP 04.09.03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	(indikator baru)	15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.09.03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	(indikator baru)	15
KP 04.09.03 - Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	medali	1 perunggu (2018)	1 emas
KP 04.09.03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	medali	1 emas/ 2 perak/ 2 perunggu (2013)	n/a
KP 04.09.03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	medali	12 emas/ 11 perak/ 14 perunggu (2021)	n/a
KP 04.18.01 - Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat	persen	17,31	29,63
KP 04.18.01 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	97,25	97,47
KP 04.18.01 - Persentase pemuda yang merokok	persen	25,56	23,65
KP 04.18.01 - Persentase Pemuda berolahraga	persen	31,92	41,06
KP 04.18.02 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh	persen	32,90	30,42
KP 04.18.02 - Rasio Kewirausahaan Pemuda	persen	1,13	1,40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.18.02 - Persentase pemuda disabilitas yang bekerja	persen	20,04	20,08
KP 04.18.02 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	persen	69,04	69,09
KP 04.18.03 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	6,16	6,37
KP 04.18.03 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,19	1,55
KP 04.21.01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	291	210
KP 04.21.01 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	100 (2023)	100
KP 04.21.01 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	182 (2023)	750
KP 04.21.01 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	22 (2023)	140
KP 04.21.01 - Jumlah Olahragawan Elite Nasional Level Dunia pada Cabang Olahraga Unggulan Paralimpiade	orang	59	100
KP 04.21.02 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	orang	300	325
KP 04.21.02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	orang	171	171
KP 04.21.02 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	lembaga	20	20
KP 04.21.03 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	lembaga	11 (2023)	11
KP 04.21.03 - Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade	lembaga	548 (2023)	548



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.21.04 - Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20
KP 04.21.04 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20
KP 04.22.01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	48,76 (2021)	74,13
KP 04.22.01 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	8,24 (2021)	12,53
KP 04.22.02 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100
KP 04.22.02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	persen	3,29	3,90

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 52.045,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - Indeks Persepsi Korupsi		37,00	40,00
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.05 - Indeks Integritas Nasional		71,53	74,52
PP 07.05 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,85	3,99
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.05.01 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)		72,34	-
KP 07.05.02 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi)		3,76	3,86
KP 07.05.03 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)		86,44	89,17

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 250.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 08.04 - Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	persen	1,54 (2023)	1,2
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 08.04.01 - Persentase Daerah yang Memiliki Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Minimal pada Kategori Sedang	persen	62 (2023)	72
KP 08.04.02 - Persentase Cakupan Layanan Peringatan Dini di Daerah Berisiko Bencana	persen	6,00	6,17
KP 08.04.02 - Persentase Daerah yang Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dan Menerima Intervensi sesuai Standar	persen	75	100
KP 08.04.03 - Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang Ditangani	persen	100	100
KP 08.04.04 - Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak	persen	10,31	10,75

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 51.930,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.09.05 - Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	kesepakatan	0	8
KP 07.16.01 - Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	persen	46,97	65,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 40.743,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.08.02 - Nilai Kinerja Pengadaan		0	51,61
KP 07.08.02 - Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan		0	63,39

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

BADAN SAR NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 532.320,4

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.01 - Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pencarian dan Pertolongan	persen	98,20 (2023)	98
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.01.08 - Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	persen	42,10 (2023)	47,90
KP 03.01.08 - Ketersediaan SDM Pencarian dan Pertolongan yang Terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020)	orang, kumulatif	5.155 (2020-2023)	15.608

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 106.331,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 05.05.08 - Indeks Persaingan Usaha		4,87/7,00 (2022)	5,51/7,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 36.602,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.08.01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi	persen	57,41	41,44

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 2.744,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.07.05 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	persen	21,46	18,29
KP 06.07.05 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	persen	44,38	46,29
KP 06.07.05 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan		0,52	0,60
KP 06.07.05 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas		0,64	0,71

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.04 - Global Terrorism Index		3,99	3,91
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.04.03 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	persen	(indikator baru)	100,00
KP 02.04.04 - Indeks Risiko Terorisme (Target)		51,97 (2023)	51,67
KP 02.04.05 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)		30,01	29,81
KP 02.04.06 - Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	persen	(indikator baru)	50,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 7.040,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.03.02 - Persentase Hasil Penindakan Pelanggaran Pemilu yang Cepat, Tanpa Biaya, Aksesibel, Mudah Dimengerti, dan Akuntabel	persen	0	0
KP 01.04.02 - Jumlah Kader Pengawas yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	orang	900	19.355
KP 07.01.03 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu		76,96	0 (tidak dihitung)
KP 07.01.04 - Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	persen	(indikator baru)	85

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 15.868,3

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.02.01 - Jangkauan Penyiaran Radio Terrestrial per Populasi	persen	70 (2023)	76,00
KP 03.02.01 - Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	persen	31 (2023)	40,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 194.015,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.02.01 - Jangkauan Penyiaran Televisi Siaran Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) per Populasi	persen	73,44 (2023)	75,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

BADAN KEAMANAN LAUT

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.499.100,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.06 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut		68,00	76,50
PP 02.06 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut		54,00	61,30
PP 02.06 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut		67,00	68,00
PP 02.06 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut		33,00	33,40
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.06.01 - Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut	persen	25,00	87,50
KP 02.06.02 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli		72,00	72,20
KP 02.06.02 - Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI	persen	5,19	9,00
KP 02.06.03 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan		58,00	68,20
KP 02.06.03 - Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	persen	100,00	100,00
KP 02.06.04 - Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan	persen	4,20	7,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 131.465,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 01.01 - Indeks Aktualisasi Pancasila		77,73 (2023)	80,15
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.01.01 - Persentase Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	persen	0	50,00
KP 01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa		78,32 (2023)	81,00
KP 01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		81,46 (2023)	84,00
KP 01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia		81,18 (2023)	84,00
KP 01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan		79,35 (2023)	82,00
KP 01.01.02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia		68,33 (2023)	71,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 3.063,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.02.02 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		0	83,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.756.848,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.08 - Pengeluaran Iptek dan Inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,31
PP 04.08 - Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta	persen	12,5 (2020)	27
PP 04.09 - Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	103
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.16.03 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	inovasi	50 (2023)	120
KP 02.16.05 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi	produk	25	75
KP 02.22.07 - Pusat Inovasi Berbasis Maritim	unit (kumulatif)	0	1
KP 04.08.01 - Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	(indikator baru)	30
KP 04.08.01 - Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index \geq 10	persen	0,12	0,20
KP 04.08.01 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset	KI/100 Periset	1,62	5,54
KP 04.08.01 - Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun	infrastruktur	8	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.08.02 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	(indikator baru)	5
KP 04.08.02 - Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN	hub	(indikator baru)	1
KP 04.08.02 - Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN	miliar Rupiah	(indikator baru)	50
KP 04.08.02 - Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	(indikator baru)	1
KP 04.08.03 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	(indikator baru)	40
KP 04.08.03 - Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas	kerjasama	(indikator baru)	30
KP 04.09.02 - Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk	SDM Iptek/1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.379
KP 04.09.02 - Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan 2% ilmuwan top dunia	orang	150	187

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

BADAN PANGAN NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 124.134,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.10 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		95,06 (2024)	97,51
PP 02.10 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		93,50 (2024)	94,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.10.08 - Cadangan Beras Pemerintah (juta ton)	juta ton	1,79	3 - 3,5
KP 02.10.12 - Konsumsi Buah dan Sayur	gram/kapita/hari	244,64	247,78
KP 02.10.12 - Konsumsi Pangan Hewani	gram/kapita/hari	124,48	131,70
KP 02.10.12 - Konsumsi Umbi-Umbian	gram/kapita/hari	41,1	56,07
KP 02.10.13 - Indeks Keamanan Pangan Segar		60,00	62,00
KP 02.10.14 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	persen	0	40,00
KP 02.10.15 - Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	12,00	15,60
KP 02.10.15 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	persen	4,02	3,60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.15.02 - Persentase Pangan yang Terselamatkan	persen	1,44	3-5
KP 05.05.01 - Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antarwaktu dan Antarwilayah	persen	(indikator baru)	17,5 - 22,5
KP 07.15.01 - Inflasi Harga Bergejolak	persen	0,12	3,00-5,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 5.176.082,6

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 06.05 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,79
PP 06.05 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	6,7
PP 06.05 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	64,35
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.05.01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	hektare	715,32	850-1.000
KP 06.05.01 - Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	0	50
KP 06.05.01 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	0	60
KP 06.05.01 - Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	60
KP 06.05.01 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,76
KP 06.05.01 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	0	1.700-4.100
KP 06.05.01 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	0	44



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 06.05.02 - Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	2,24
KP 06.05.02 - Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun Rupiah	58,41	70
KP 06.05.02 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	klaster	1	2
KP 06.05.02 - Persentase Masyarakat Sejahtera	persen	8,91	10,00
KP 06.05.02 - Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	69
KP 06.05.02 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	74
KP 06.05.02 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	19
KP 06.05.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,78
KP 06.05.02 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	94,90
KP 06.05.02 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	hektar	0	150

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

BADAN KARANTINA INDONESIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 384.824,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.10.10 - Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	persen	-	83
KP 02.10.13 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	persen	-	35,00
KP 02.10.13 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	persen	-	87,00
KP 02.10.13 - Persentase Wilayah Terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	persen	-	87,00
KP 02.10.13 - Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	persen	-	87,00
KP 02.16.02 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia	persen	(indikator baru)	82
KP 02.16.04 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	persen	(indikator baru)	65

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

BADAN GIZI NASIONAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 250.536.516,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.12 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	87,3 (2023)	88,56
PP 04.12 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	75,03 (2023)	75,39
PP 04.12 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen	(indikator baru)	92
PP 04.12 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	(indikator baru)	100
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.12.01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	50
KP 04.12.01 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	50
KP 04.12.01 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	16
KP 04.12.01 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/ sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	86
KP 04.12.01 - Persentase siswa SD/MI/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	86
KP 04.12.01 - Persentase siswa SMP/MTs/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	85
KP 04.12.01 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.12.01 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	100
KP 04.12.01 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	41
KP 04.12.01 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	persen	(indikator baru)	60
KP 04.12.01 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	persen	(indikator baru)	60
KP 04.12.02 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	sistem	(indikator baru)	1
KP 04.12.02 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	(indikator baru)	100
KP 04.12.02 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	persen	(indikator baru)	100

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 15.400,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 01 - Indeks Demokrasi Indonesia		79,81	82,12–85,66
PN 02 - <i>Asia Power Index (Military Capability)</i>		15,70	17,00
PN 02 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	62,8 (2020)	68
PN 02 - <i>Global Cybersecurity Index</i>		100,00	95,00
PN 02 - Indeks Keamanan Laut Nasional		59,00	61,00
PN 07 - Indeks Integritas Partai Politik		62,83	65,00–66,99
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 01.01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan		76,86	84,56–88,20
PP 01.03 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		79,48	79,88–83,32
PP 01.04 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan		82,51	81,98–85,51
PP 07.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi		64,98	67,00–68,99
PP 07.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan		61,42	64,00–65,99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 07.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik		61,85	64,00–65,99
PP 07.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal		61,11	64,00–65,99
PP 07.01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen		67,47	70,00–71,99
PP 07.01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		61,72	67,98
PP 07.03 - Indeks Kelembagaan Hukum		0,73 (2023)	0,77
PP 07.03 - Indeks Penegakan Hukum		0,64 (2023)	0,74
PP 07.05 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang		5,37 (2022)	5,60
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.01.01 - Jaminan Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat oleh Aparat Negara		84,97	82,89–87,57
KP 01.03.01 - Kinerja Lembaga Legislatif dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi		63,18	55,99–59,23
KP 07.03.01 - Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum		0,73 (2023)	0,70
KP 07.03.02 - Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum	persen	56,70 (2023)	56,70

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 500,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 07 - Indeks Pembangunan Hukum		0,68 (2023)	0,70

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		71,20	75,40
PN 02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	persen	0,67	2,8-3,1
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.10 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	persen	8,24	6,55

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48 (2022)	3,50
PN 03 - Stok Infrastruktur terhadap PDB	persen	43,00 (2019)	47,00
PN 06 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	persen	65,25	68,66
PN 06 - Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	persen	56,56 (2022)	57,70

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 23.000,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 03 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	persen	6,92	7,40-8,00
PN 06 - Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	18,20
PN 06 - Tingkat Kemiskinan	persen	8,57 (September 2024)	6,5 - 7,5
PN 06 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	1,26	0-0,5
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 06.02 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	64,75 (2023)	73
PP 06.02 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	31,21	34,99
PP 06.03 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	persen	73,8	74,6
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.02.02 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif	rekomendasi kebijakan	3 (2023)	3
KP 06.07.07 - Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	kementerian/lembaga	4	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

KEMENTERIAN HUKUM

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 84.306,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 07.02 - Indeks Materi Hukum		0,60 (2023)	0,52
PP 07.02 - Indeks Budaya Hukum		0,81 (2023)	0,84
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 07.02.01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,70	3,27
KP 07.02.02 - Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	persen	84,40 (2023)	89,20
KP 07.02.03 - Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat		0,67 (2023)	0,73
KP 07.02.03 - Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum		0,95 (2023)	0,95

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 36.750,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 01 - Indeks Hak Asasi Manusia		2,70 (2023)	2,80
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 01.05 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		2,60 (2023)	2,70
PP 01.05 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		2,80 (2023)	2,90
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 01.05.01 - Persentase K/L/D dan Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAM	persen	0	50,25
KP 01.05.02 - Persentase Capaian Aksi RANHAM	persen	83,47	60,00

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 50.776.343,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.01 - Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD	persen	63,81	64,60
PP 04.02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	48,17	48,59
PP 04.04 - Indeks Pemerataan Guru		36,91	34,91
PP 04.05 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	persen	62,80	65,34
PP 04.05 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	64,94 (2023)	69,38
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.01.01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	36,03	36,74
KP 04.01.02 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	26,67	35,60
KP 04.01.03 - Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya		0,765	0,794
KP 04.01.04 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	anak	(indikator baru)	306.510



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.02.01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	15,69	17,07
KP 04.02.02 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar	persen	18,15	54,46
KP 04.02.03 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	68,13; 62,51 (2023)	70,62; 69,35
KP 04.02.04 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	persen	50,19	79,38
KP 04.02.06 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	83,94	91,98
KP 04.02.08 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkatkan mutu pembelajarannya	persen	22,01	26,85
KP 04.04.01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	57,94	85,06
KP 04.04.02 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	32,61	47,83
KP 04.05.01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	54,06 (2023)	62,44
KP 04.05.02 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	persen	42,75	67,75
KP 04.05.03 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	persen	89,67 (2023)	98,97
KP 04.07.01 - Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	44,40	46,65
KP 04.19.01 - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	persen	87,29	87,76



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.20.01 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	12,33	13,82
KP 08.02.05 - Indeks Pembangunan Kebahasaan		45,82 (2022)	52,72

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 23.665.407,4

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.02 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	0	75
PP 04.06 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	persen	32,00	34,92
PP 04.06 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha;	persen	(a) 62,21; (b) 79,86	(a) 62,95; (b) 84,22
PP 04.06 - Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul	persen	23,59 (2020)	29,93
PP 04.06 - Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas	persen	92,65 (2020)	93,80
PP 04.06 - Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar	persen	40,67 (2022)	44,91
PP 04.06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM	persen	28,36	29,51
PP 04.07 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	persen	42,51	46,38
PP 04.08 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000	perguruan tinggi	a) 6; b) 12; c) 22	a) 8; b) 13; c) 23;
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.02.07 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	unit	(indikator baru)	4
KP 04.02.07 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	unit	(indikator baru)	15
KP 04.04.01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi	persen	94,24 (2022)	98,56
KP 04.04.01 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul	persen	0 (2022)	2,5
KP 04.06.01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)		0,34	0,49
KP 04.06.01 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%	provinsi	23	24
KP 04.06.01 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	bulan	7,20	6,75
KP 04.06.01 - Rasio Outbound per Inbound mahasiswa	persen	6,50 (2018)	7,32
KP 04.06.01 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	persen	39,25	33,49
KP 04.06.02 - Proporsi Program Studi STEM	persen	43,45 (2022)	48,98
KP 04.06.02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM	persen	A. 14,97; B.14,90; C. 15,02 (2022)	A.17,58; B.17,53; C.17,63
KP 04.06.03 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	persen	59,55 (2022)	64,46
KP 04.06.03 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	perguruan tinggi	11 (2023)	13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.06.04 - Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM	persen	Total: 18,18 (2021); STEM: 16,01 (2021); Non STEM: 19,93 (2021)	Total: 22,34; STEM: 19,79; Non STEM: 24,36
KP 04.06.04 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	persen	50,12 (2023)	51,85
KP 04.06.04 - Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas	orang	16.551 (2023)	17.500
KP 04.07.02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha	persen	(a) 60,98; (b) 4,78	(a) 74,75; (b) 5,00
KP 04.08.01 - Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk	SDM Iptek/ juta penduduk	1.242	1.292
KP 04.08.02 - Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	(indikator baru)	5
KP 04.08.02 - Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5
KP 04.08.02 - Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa	lembaga	(indikator baru)	0
KP 04.08.02 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi	milyar rupiah	(indikator baru)	75
KP 04.08.02 - Jumlah startup binaan yang produktif	startup	(indikator baru)	4
KP 04.08.04 - Indeks QS International Research Network Collaboration		15,50	21,88



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 04.08.04 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index		a) 6,07; b) 318	a) 2,61; b) 318
KP 04.08.04 - Jumlah paten granted dari perguruan tinggi	paten	17.706	20.000
KP 04.08.04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	produk	82.051	89.000
KP 04.09.02 - Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenisnya di tingkat pelajar dan mahasiswa	peraih	100 (2023)	188
KP 04.15.03 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	persen	2,06 (2020)	17,37

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 742.247,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.09 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional	karya seni budaya	15 (2023)	18
PP 08.02 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		57,13 (2023)	58,99
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.09.01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	talenta seni budaya	97 (2023)	126
KP 04.09.01 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	6	8
KP 04.09.01 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	31,49	34,07
KP 08.02.01 - Persentase Penduduk yang Mengikuti Gotong Royong dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Lainnya	persen	36,00 (2023)	37,06
KP 08.02.02 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	persen	58	62
KP 08.02.03 - Persentase Penduduk yang Bekerja di Bidang Seni Budaya	persen	0,43 (2023)	0,51



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 08.02.03 - Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Kumulatif)	kawasan	1	3
KP 08.02.04 - Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	persen	1,58	1,76
KP 08.02.04 - Jumlah Wilayah Adat yang Dikembangkan dalam Pemajuan Kebudayaan	wilayah adat	3	4
KP 08.02.07 - Jumlah Warisan Budaya Indonesia yang Diusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia	unit	2	5
KP 08.02.07 - Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Kumulatif)	rumah budaya	10 (2017)	12

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

BADAN PENYELENGGARA HAJI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 486.160,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 08.01.06 - Persentase Nilai Pertumbuhan Perolehan Nilai Manfaat Dana Haji	persen	10,4	12,8

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 483.838,9

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.13.03 - Jumlah Produk Baru yang Tersertifikasi Halal	juta produk	2,22	7,00
KP 08.01.07 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal		88,56	91,69
KP 08.01.07 - Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal	persen	34,08	46,10

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

KEMENTERIAN KEHUTANAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.453.768,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.21 - Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan	triliun Rupiah	122,2	136,19
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.10.11 - Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)	ton	267.219	500.000
KP 02.12.04 - Luasan Lahan Kritis dalam DAS yang Dipulihkan	juta hektare	12,74 (2022)	12,40
KP 02.12.04 - Jumlah Mata Air yang Dipertahankan dan Diselamatkan	unit	50	120
KP 02.16.01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	294 (2023)	325
KP 02.16.01 - Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	hektare	(indikator baru)	500.000
KP 02.16.01 - Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	hektare	29.734,22	22.000
KP 02.16.02 - Indeks Daftar Merah Nasional status keterancam spesies		0,75	0,75
KP 02.16.03 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat (kumulatif)	(indikator baru)	775



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.16.04 - Nilai PNBPN dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	miliar Rupiah	25,96	26
KP 02.16.04 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta hektare (kumulatif)	2,0	2,2
KP 02.16.04 - Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	miliar Rupiah	204	215
KP 02.16.05 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	produk (kumulatif)	10	15
KP 02.17.07 - Luas kawasan hutan yang diamankan	hektare	4.589.460 (2023)	900.000
KP 02.21.01 - Nilai PNBPN Fungsional Kehutanan	triliun Rupiah	7,16	8,29
KP 02.21.01 - Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,01	15,82
KP 02.21.02 - Nilai Investasi Sektor Kehutanan	triliun Rupiah	0	0,48
KP 02.21.03 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPB)	unit	1.467	1.587
KP 02.21.04 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	desa	0	1.056
KP 02.21.05 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)	kelompok masyarakat	14.774	16.454
KP 02.21.05 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar Rupiah	1.400	2.150
KP 02.21.06 - Penurunan Laju Deforestasi	juta ha/tahun	0,120	0,106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 222.843,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		73,53	76,67
PN 02 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,35 (2020)	0,47
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.16 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik	model	1	1
PP 02.16 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	unit	0,40 (2020)	0,55
PP 02.16 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		0,31 (2020)	0,39
PP 02.17 - Indeks Kualitas Air (IKA)		54,78	72,21
PP 02.17 - Indeks Kualitas Udara (IKU)		90,13	78,77
PP 02.17 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		81,67	81,07
PP 02.17 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)		61,95	78,02
PP 02.17 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	30	40
PP 02.17 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	persen	0,564	≤50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 02.18 - Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		52,64 (2023)	60
PP 08.03 - Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan)	persen	0,995 (2023)	0,275
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.12.06 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL	persen	0	30
KP 02.15.03 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan	produk ramah lingkungan (akumulatif)	51	90
KP 02.15.04 - Persentase sampah yg didaur ulang	persen	13	17
KP 02.16.01 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengelolaanya	unit	2	2
KP 02.16.03 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	dokumen	1	1
KP 02.16.03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	lembaga	(indikator baru)	10
KP 02.16.05 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)	rekomendasi kebijakan (kumulatif)	40	48
KP 02.17.01 - Ketersediaan Status Mutu DAS dan Danau	data	188	192



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.17.01 - Jumlah Sungai dan Danau yang Mengalami Peningkatan Status Mutu	lokasi	1	5
KP 02.17.01 - Jumlah kabkota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air	kabupaten/kota	0	-
KP 02.17.01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	industri	2.853	3.030
KP 02.17.02 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara	kabupaten/kota	0	514
KP 02.17.02 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	2.855	3.030
KP 02.17.03 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m2	127.600	5.000
KP 02.17.03 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	pelabuhan/industri	36	40
KP 02.17.03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	provinsi	0	37
KP 02.17.04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan		77,98	78,03
KP 02.17.04 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan	kabupaten/kota	0	552
KP 02.17.04 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)	industri	113	118
KP 02.17.05 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		64,11	64,19
KP 02.17.05 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	industri	330	265
KP 02.17.06 - Jumlah B3 yang dikelola	ton	6.220.572	6.503.006
KP 02.17.06 - Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	ton	62.508.066	70.206.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.17.07 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/kegiatan/izin	80	250
KP 02.17.07 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	14	22
KP 02.17.08 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	provinsi/kabupaten /kota	24	75
KP 02.17.08 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	persen	100	100
KP 02.17.08 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	63	70
KP 02.18.01 - Persentase Sampah yang dikelola	persen	39,01	63,41
KP 02.19.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Hutan	juta ton CO2-Eq	-	428,92
KP 02.19.02 - Reduksi Emisi GRK Sektor Pertanian	juta ton CO2-Eq	-	6,89
KP 02.19.05 - Reduksi Emisi GRK Sektor Limbah	juta ton CO2-Eq	8,8	18,04
KP 02.19.06 - Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi	sektor	5	5
KP 02.19.06 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon	kebijakan	2	5
KP 08.03.05 - Persentase Aksi Pendukung Ketahanan Iklim yang Dilaksanakan di Lokasi Prioritas	persen	0	15

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 50.959.755,3

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.12 - Kapasitas Tampungan Air	m3/kapita	58,99 (2025)	59,39
PP 02.12 - Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	persen	52,83 (2025)	52,34
PP 02.12 - Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	persen	61,55	61,73
PP 02.12 - Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	persen	15,6	15,83
PP 02.12 - Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	USD/m3	0,31	0,31
PP 02.12 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	persen	8 (2025)	13
PP 02.12 - Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	persen	20,49 (2023)	36
PP 02.12 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	10,25	17
PP 03.01 - Waktu Tempuh Pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional	jam/100 km	1,90	1,85
PP 06.04 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	persen	44,13 (2022)	44,58
PP 06.04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan		44,61 (2023)	45,01
PP 06.04 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	persen	6,97 (2022)	7,64



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
PP 06.04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan		48,36 (2023)	48,96
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.12.01 - Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	unit (kumulatif)	950 (2025)	950
KP 02.12.01 - Jumlah bendungan yang selesai dibangun	unit (kumulatif)	0 (2025)	4
KP 02.12.01 - Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	unit (kumulatif)	0 (2025)	0
KP 02.12.01 - Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	unit (kumulatif)	23 (2025)	23
KP 02.12.01 - Jumlah bendungan yang direhabilitasi	unit (kumulatif)	4 (2025)	4
KP 02.12.02 - Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	persen	35	35
KP 02.12.02 - Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	wilayah sungai	50	50
KP 02.12.02 - Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m3/detik (kumulatif)	77,45	77,70
KP 02.12.02 - Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik (kumulatif)	0,05 (2025)	0,05
KP 02.12.02 - Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m3/detik (kumulatif)	0 (2025)	0
KP 02.12.02 - Luas layanan irigasi yang dikelola	ha (kumulatif)	3.142.532	3.155.532



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.12.02 - Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dibangun untuk Pertanian Multikomoditas	ha (kumulatif)	13.000 (2025)	15.000
KP 02.12.02 - Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020- 2024)	218.000
KP 02.12.02 - Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	miliar m3	58,32	52,63
KP 02.12.03 - Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	persen	36	39
KP 02.12.03 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	ha (kumulatif)	1.700 (2025)	2.700
KP 02.12.03 - Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	unit (Kumulatif)	549	549
KP 02.12.03 - Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	km (kumulatif)	1.784	1.809
KP 02.12.03 - Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	juta m3	0,35	0,50
KP 02.12.03 - Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	kawasan (kumulatif)	0	5
KP 02.12.03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	wilayah sungai (kumulatif)	19	21
KP 02.12.05 - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	24,00 (2020)	42,24
KP 02.12.05 - Kapasitas SPAM Terbangun	liter/detik	281.045	282.716
KP 02.12.05 - Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	30,12	33,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.12.05 - Persentase Non-Revenue Water PDAM	persen	33,51	30,00
KP 02.12.06 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Berfungsi dengan Baik	kab/kota	196	270
KP 02.12.06 - Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun	sambungan rumah	700.000	850.000
KP 02.12.06 - Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik dan Disedot Secara Berkala	persen	9,35 (2023)	15,00
KP 02.12.06 - Idle Capacity IPLT	persen	75,27 (2023)	65,00
KP 02.12.06 - Idle Capacity IPAL	persen	65 (2023)	62
KP 02.12.06 - Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	kab/kota	19 (2023)	40
KP 02.12.07 - Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM	provinsi dan kab/kota	15 provinsi dan 103 kabupaten/kota	23 provinsi dan 261 kabupaten/kota
KP 02.12.07 - Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	21 provinsi dan 505 kabupaten/kota	27 provinsi dan 508 kabupaten/kota
KP 02.12.07 - Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	278 (2023)	350
KP 02.12.07 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMN air minum	102	231



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.12.07 - BUMD Air Minum Berkinerja Sehat	persen	65,48	81
KP 02.12.07 - Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik	BUMD air minum	5 (2023)	10
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	6
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2
KP 02.12.08 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang Air Minum (kumulatif)	proyek (kumulatif)	0 (2023)	1
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan Air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	1
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	11
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0
KP 02.12.09 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	hektare (kumulatif)	200 (2025)	400
KP 02.12.09 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (kumulatif)	0,2 (2025)	0,5
KP 02.12.09 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	33,5
KP 02.12.09 - Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kabupaten/kota (kumulatif)	32	37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 02.18.02 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	28 (17 terdaur ulang)
KP 02.18.02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	unit	0	0
KP 03.01.01 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan	km/100 km ²	2,70	2,78
KP 03.01.01 - Panjang Jalan Tol yang Beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km	933 (2020 - 2024)	1.399
KP 03.01.01 - Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	persen	95/69/55	95/72/58/83
KP 03.01.06 - Infrastruktur Jalan Perkotaan yang Dibangun (kumulatif)	km (kumulatif)	51,50 (2020 - 2024)	67,11 (2020 - 2026)
KP 06.04.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	40,75 (2022)	41,14
KP 06.04.01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI		45,86 (2023)	46,46
KP 06.04.01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,38 (2022)	3,44
KP 06.04.01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI		42,74 (2023)	43,34
KP 06.04.02 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	3,83 (2022)	3,92
KP 06.04.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI		49,81 (2023)	50,41
KP 06.04.02 - Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,15 (2022)	3,72
KP 06.04.02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI		47,20 (2023)	47,8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 06.06.04 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	kabupaten/Kota	514	514
KP 06.07.01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	persen	18,9 (2023)	24
KP 06.07.01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	persen	4,77 (2023)	7
KP 08.04.05 - Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	persen	0	38

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 924.886,7

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 06.06 - Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi	unit/tahun	769.078	2.140.288
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.06.01 - Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun (unit)	unit/tahun	2.830	476
KP 06.06.01 - Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya (unit)	unit/tahun	130.394	21.500
KP 06.06.01 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (unit)	unit/tahun	21.159	1.173
KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) (unit)	unit/tahun	3.930	358
KP 06.06.02 - Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal	unit/tahun	0	5.000
KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan (rumah tangga)	rumah tangga/tahun	477.733	315.000
KP 06.06.04 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1
KP 06.06.05 - Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu (Ha)	hektare/tahun	2,86	11
KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24,62	25,01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

KEMENTERIAN PARIWISATA

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 789.882,1

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.05 - Pengeluaran Wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.239 (2023)	1.372-1.404
PP 03.05 - Tenaga Kerja Pariwisata	juta orang	22.89 (2022)	26,53
PP 03.05 - Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index, *terbit bienial tahun genap)		22	20
PP 03.05 - Kunjungan Wisatawan mancanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	16,0-17,6
PP 03.05 - Perjalanan Wisatawan Nusantara	juta perjalanan	852,80 (2023)	1.176
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.22.06 - Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	lokasi destinasi pariwisata bahari	0	10
KP 02.22.06 - Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu perjalanan	7.797,76 (2023)	14.435,13
KP 02.22.06 - Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu kunjungan	8.344,92 (2023)	13.144,47
KP 03.05.01 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	19.976.019,10 (2023)	23.124.739,11
KP 03.05.01 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	22.165,11	25.282,06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.05.01 - Devisa Pariwisata	juta USD	672,00	767,94
KP 03.05.01 - Tenaga Kerja Pariwisata Jawa Tengah	orang	3.214.769 (2023)	3.408.096
KP 03.05.01 - Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	955.099,60 (2023)	1.330.356,95
KP 03.05.01 - Tenaga Kerja Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	orang	471.212 (2023)	484.686
KP 03.05.02 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	juta Rupiah	54.683.173,97 (2023)	63.302.609,27
KP 03.05.02 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Bali	miliar Rupiah	101.325,81 (2023)	136.347,00
KP 03.05.02 - Devisa Pariwisata Bali	juta USD	9.364,00 (2019)	13.319,94
KP 03.05.02 - Tenaga Kerja Pariwisata Bali	orang	622.432 (2022)	651.718
KP 03.05.02 - Investasi Sektor Pariwisata Bali	juta Rupiah	7.547.919,45 (2023)	10.513.486,87
KP 03.05.03 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	juta Rupiah	6.301.872,60 (2023)	7.295.205,27
KP 03.05.03 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Kepulauan Riau	miliar Rupiah	5.413,10 (2019)	6.925,58
KP 03.05.03 - Devisa Pariwisata Kepulauan Riau	juta USD	2.001,10 (2019)	3.243,58
KP 03.05.03 - Tenaga Kerja Pariwisata Kepulauan Riau	orang	236.159 (2022)	317.193



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.05.03 - Investasi Sektor Pariwisata Kepulauan Riau	juta Rupiah	2.355.111,35 (2023)	3.280.431,44
KP 03.05.04 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta	juta Rupiah	191.980.855,20 (2023)	222.241.837,50
KP 03.05.04 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Greater Jakarta	miliar Rupiah	367.760,29 (2023)	452.039,65
KP 03.05.04 - Devisa Pariwisata Jakarta	juta USD	2.291,80 (2019)	3.680,13
KP 03.05.04 - Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (DKI)	orang	1.479.227 (2022)	1.557.469
KP 03.05.04 - Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (Jawa Barat)	orang	4.978.804 (2022)	5.811.446
KP 03.05.04 - Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (Banten)	orang	1.230.545 (2022)	1.635.835
KP 03.05.04 - Investasi Sektor Pariwisata Greater Jakarta	juta Rupiah	12.650.725,3 (2023)	15.784.170,80
KP 03.05.05 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	2.206.361,02 (2023)	2.554.138,68
KP 03.05.05 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	12,566	17.550,24
KP 03.05.05 - Devisa Pariwisata	juta USD	290 (2018)	957,52
KP 03.05.05 - Tenaga Kerja Pariwisata	orang	430.437 (2023)	555.502



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.05.05 - Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	4.488.604,30 (2023)	6.252.170,90
KP 03.05.06 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	juta Rupiah	2.573.717,65 (2023)	2.979.399,89
KP 03.05.06 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Manado-Likupang	miliar Rupiah	6.491,89 (2019)	10.572,37
KP 03.05.06 - Devisa Pariwisata Manado-Likupang	juta USD	139(2019)	297,81
KP 03.05.06 - Tenaga Kerja Pariwisata Manado-Likupang	orang	208.674 (2022)	223.800
KP 03.05.06 - Investasi Sektor Pariwisata Manado-Likupang	juta Rupiah	774.326,55 (2023)	1.078.558,41
KP 03.05.07 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	juta Rupiah	3.281.893,64 (2023)	3.792.692,93
KP 03.05.07 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Bangka Belitung	miliar Rupiah	2.455,23 (2019)	14.925,58
KP 03.05.07 - Devisa Pariwisata Bangka Belitung	juta USD	23,90 (2019)	48,60
KP 03.05.07 - Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung	orang	98.106 (2022)	113.192
KP 03.05.07 - Investasi Sektor Pariwisata Bangka Belitung	juta Rupiah	527.458,60 (2023)	734.696,38
KP 03.05.08 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	2.193.003,64 (2022)	2.538.675,84
KP 03.05.08 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	1.925,20	2.179,51



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.05.08 - Devisa Pariwisata	juta USD	145,70	184,40
KP 03.05.08 - Tenaga Kerja Pariwisata	orang	1.248.769 (2023)	1.327.710
KP 03.05.08 - Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	411.336,50 (2023)	572.950,06
KP 03.05.09 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	juta Rupiah	14.636,37 (2022)	19.106,32
KP 03.05.09 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Raja Ampat	miliar Rupiah	195,67 (2022)	332,80
KP 03.05.09 - Devisa Pariwisata dari Raja Ampat	juta USD	5 (2019)	47,96
KP 03.05.09 - Tenaga Kerja Pariwisata Raja Ampat	orang	7.542 (2022)	9.623
KP 03.05.09 - Investasi Sektor Pariwisata Raja Ampat	juta Rupiah	12.575,05 (2023)	17.515,77
KP 03.05.10 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	38.850 (2023)	45.063,74
KP 03.05.10 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	974,49	1.417,33
KP 03.05.10 - Devisa Pariwisata	juta USD	231,57	347,12
KP 03.05.10 - Tenaga Kerja Pariwisata	orang	299.160 (2023)	324.957
KP 03.05.10 - Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	532.233,85 (2023)	741.347,82
KP 03.05.11 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	juta Rupiah	17.501.425,28 (2023)	20.225.375,70
KP 03.05.11 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	miliar Rupiah	838,70	1.474,67



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.05.11 - Devisa Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta USD	4,00 (2019)	9,46
KP 03.05.11 - Tenaga Kerja Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	orang	3.493.968 (2022)	4.121.599
KP 03.05.11 - Investasi Sektor Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta Rupiah	778.773,45 (2023)	1.084.752,49
KP 03.05.12 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	juta Rupiah	35.525,73 (2023)	41.055,01
KP 03.05.12 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Wakatobi	miliar Rupiah	108	163,66
KP 03.05.12 - Devisa Pariwisata Wakatobi	juta USD	7,44	11,84
KP 03.05.12 - Tenaga Kerja Pariwisata Wakatobi	orang	209.447 (2022)	256.301
KP 03.05.12 - Investasi Sektor Pariwisata Wakatobi	juta Rupiah	31.376,65 (2023)	53.701,14
KP 03.05.13 - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai	juta Rupiah	2.584,92 (2023)	2.992,37
KP 03.05.13 - Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Morotai	miliar Rupiah	103,92 (2022)	177,57
KP 03.05.13 - Devisa Pariwisata Morotai	juta USD	0,69	0,89
KP 03.05.13 - Tenaga Kerja Pariwisata Morotai	orang	73.603 (2022)	86.163
KP 03.05.13 - Investasi Sektor Pariwisata Morotai	juta Rupiah	1.151,65 (2023)	55.422,25

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 210.506,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.06 - Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	persen	5,30 (2022)	5,70
PP 03.06 - Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	persen	-11,07 (2023)	5,30
PP 03.06 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	juta orang	24,92 (2023)	26,06
PP 03.06 - Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	persen	31,94 (2023)	5,80–7,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.06.01 - Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	triliun Rupiah	89,33 (2023)	131,00–146,46
KP 03.06.02 - Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	persen	2,72 (2022)	7,45–9,90
KP 03.06.02 - Pertumbuhan Ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	persen	-8,00 (2020)	7,30–12,30
KP 03.06.02 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	ribu orang	188 (2022)	208
KP 03.06.03 - Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya	persen	7,76 (2022)	5,90–8,00
KP 03.06.03 - Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya	persen	-12,01 (2023)	4,00
KP 03.06.03 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya	ribu orang	9.107 (2022)	10.092



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.06.04 - Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim	persen	2,58 (2022)	6,90–7,40
KP 03.06.04 - Pertumbuhan Ekspor Subsektor Aplikasi dan Gim	persen	152,41 (2021)	6,50–11,70
KP 03.06.04 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim	ribu orang	152 (2022)	200
KP 03.06.05 - Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner	persen	8,61 (2022)	5,80–8,90
KP 03.06.05 - Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner	persen	-2,47 (2023)	5,70
KP 03.06.05 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner	ribu orang	13.435 (2022)	14.259
KP 05.05.05 - Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif	miliar USD	25,10	27,85

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

KEMENTERIAN KOPERASI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 504.355,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.03 - Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	persen	0,97	1,12
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.03.01 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi	persen	7,24	8,60
KP 06.03.04 - Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	persen	0	11,5
KP 06.03.04 - Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	persen	0	70,0

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 43.205,2

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.03 - Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	persen	3,06	3,15
PP 03.03 - Rasio Kewirausahaan	persen	3,08	3,18
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.03.02 - Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha	persen	18,64	20,00
KP 03.03.02 - Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan	persen	19,00	22,20
KP 03.03.03 - Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh	persen	18,99	19,98
KP 06.03.01 - Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap	persen	3,9 (2023)	4,20

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 1.885.228,5

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 06 - Persentase Desa Mandiri	persen	22,85	23,91
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 6,07 - Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI	persen	KTI: 7,42; KBI: 15,42	KTI: 7,89; KBI: 16,02
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.07.01 - Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	persen	25,99	26,26
KP 06.07.02 - Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes	persen	3,97	4,07
KP 06.07.02 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	kawasan	3	5
KP 06.07.02 - Persentase Desa Berketahanan Iklim	persen	33,73	35,73
KP 06.07.03 - Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital	persen	74 (2022)	78
KP 06.07.04 - Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju	persen	(indikator baru)	23,33



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 270.686,4

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 06.07.06 - Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	52,88	58,10
KP 06.07.06 - Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		0,425	0,475
KP 06.07.06 - Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	0,90	1,20
KP 06.07.06 - Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	37,5	45

Keterangan:

1. Alokasi prioritas Kementerian/Lembaga merupakan nilai total alokasi yang bersumber dari Rincian Prioritas pada Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026;
2. Alokasi prioritas bersumber dari Rupiah Murni dan Non-Rupiah Murni (PHLN/PDN/SBSN/PNBP/BLU).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 02 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)	peringkat	3 (2023)	3
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 02.13 - Kontribusi PDB Syariah	persen	46,72 (2023)	50,78
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 02.13.01 - Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim	persen	20,41 (2023)	11,34
KP 02.13.02 - Nilai Ekspor Halal/PDB	persen	3,69 (2023)	3,74
KP 02.13.04 - Aset Keuangan Syariah/PDB	persen	42,67	46,62
KP 02.13.05 - Zakat Infat Sedekah-Dana Sosial Keagamaan (ZIS-DSKL)/PDB	persen	0,155 (2023)	0,178
KP 02.13.05 - Aset Wakaf Uang/PDB	persen	0,011 (2023)	0,018

Keterangan:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tidak memiliki alokasi Rincian Prioritas berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

OTORITAS JASA KEUANGAN

ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional			
PN 03 - Total Aset Sektor Keuangan/PDB	persen	169,10	188,60
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 03.04 - Aset Perbankan/PDB	persen	57,21	64,51
PP 03.04 - Aset Dana Pensiun/PDB	persen	6,81	7,63
PP 03.04 - Aset Asuransi/PDB	persen	8,93	9,30
PP 03.04 - Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	persen	55,72	59,90
PP 03.04 - Total Kredit/PDB	persen	35,35	38,46
PP 03.04 - Inklusi Keuangan	persen	88,70 (2023)	91,50
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 03.04.01 - Total DPK/PDB	persen	39,92	42,73
KP 03.04.01 - Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	persen	19,23	22,24
KP 03.04.02 - Densitas Dana Pensiun	juta Rupiah	1,01	1,14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
KP 03.04.02 - Penetrasi Asuransi	persen	2,7	3,1
KP 03.04.02 - Nilai transaksi saham/PDB	persen	16,99	18,81

Keterangan:

Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki alokasi Rincian Prioritas berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

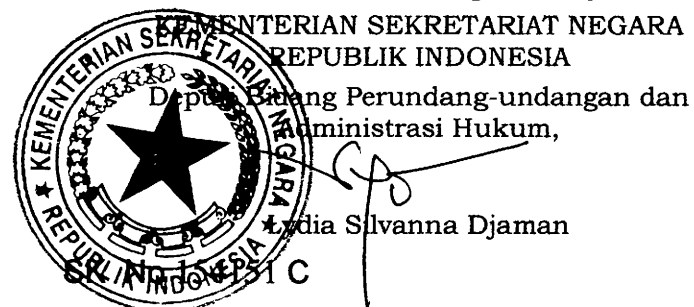
ALOKASI PRIORITAS (RP. JUTA): 0,0

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			
PP 04.15 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	98,42	98,70
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			
KP 04.15.04 - Cakupan kepesertaan aktif JKN	persen	76,5 (2023)	80,5
KP 04.15.04 - Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	(indikator baru)	86
KP 04.15.04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan	angka	2,92 (prognosis 2024)	1,5 - 6
KP 04.17.01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	persen	70	73,0

Keterangan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak memiliki alokasi Rincian Prioritas berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2026

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO